

KANWIL KEMENKUM BABEL GANDENG OMBUDSMAN UNTUK AWASI SELEKSI MAHASISWA POLTEKPIN 2026

Minggu, 27 September 2026 - kepbabel

Persiapan Pengawasan Eksternal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari persiapan pengawasan eksternal terhadap Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Ombudsman setempat pada Senin, 21 September 2026.

Perwakilan Kanwil hadir dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Pranata Humas Ahli Muda Sriyani Agustina, serta tim kerja analis SDM. Dari pihak Ombudsman hadir Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, beserta jajaran.

Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas beberapa hal teknis yang menjadi bagian dari rencana pengawasan eksternal, antara lain:

Rencana kehadiran Ombudsman pada pelaksanaan tahapan seleksi;

Kebutuhan pendukung pengawasan selama proses seleksi;

Aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan yang perlu disamakan pemahamannya.

Pembahasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi kebutuhan administratif dan teknis agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Komitmen Pengawasan

Menurut laporan pertemuan, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kesiapan institusinya untuk hadir dan menjalankan fungsi pengawasan eksternal pada kegiatan seleksi tersebut. Kesiapan ini menjadi bagian dari upaya memastikan akuntabilitas proses seleksi bagi masyarakat dan calon peserta.

Sementara itu, Kanwil Kemenkum Babel melalui kehadiran pejabat struktural dan tim terkait menekankan pentingnya koordinasi awal untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis yang diperlukan oleh pengawas eksternal.

Dampak Lokal dan Kepentingan Publik

Pengawasan eksternal oleh Ombudsman pada proses seleksi sekolah kedinasan seperti Poltekipin memiliki beberapa implikasi penting bagi publik di Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap keterbukaan dan fairness proses seleksi;

Mengurangi potensi maladministrasi atau pelanggaran prosedur;

Memberikan mekanisme pengawasan independen sehingga hasil seleksi lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi calon peserta seleksi, keterlibatan Ombudsman dapat menjadi jaminan bahwa tahapan seleksi diawasi pihak independen yang berwenang menangani masalah pelayanan publik dan maladministrasi.

Langkah Tindak Lanjut

Dalam pertemuan disepakati tindak lanjut berupa penyusunan daftar kebutuhan pendukung pengawasan dan penajaman mekanisme pelaksanaan agar Ombudsman dapat melaksanakan pemantauan secara optimal. Kanwil dan Ombudsman akan menyamakan pemahaman terkait lingkup pengawasan serta prosedur pelaporan temuan apabila ditemukan permasalahan selama pelaksanaan seleksi.

Institusi Perwakilan Peran dalam Pertemuan

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung Johan Manurung dkk. Koordinator persiapan pelaksanaan seleksi

Perwakilan Ombudsman RI Kep. Bangka Belitung Kgs Chris Fither dkk. Pengawas eksternal yang siap hadir

Catatan Penutup

Koordinasi ini menjadi bagian dari rangkaian langkah persiapan penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Poltekipin Tahun Anggaran 2026. Penyamaan pemahaman mekanisme dan persiapan kebutuhan teknis menjadi fokus agar pengawasan eksternal berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih rinci mengenai jadwal pelaksanaan seleksi dan mekanisme pengaduan publik selama proses seleksi akan diumumkan oleh penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.